

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Kabupaten Sragen

2.1.1 Profil Kabupaten Sragen

Kabupaten Sragen merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah dan berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Timur, sehingga menjadikan letak Kabupaten Sragen menjadi strategis. Kabupaten Sragen dipimpin oleh seorang Bupati perempuan bernama Kusdinar Untung Yuni Sukowati, dan wakilnya bernama Dedy Endriyatno (www.sragen.go.id). Sejak memimpin Kabupaten Sragen memiliki visi “Bangkit bersama mewujudkan bumi Sukowati yang sejahtera dan bermartabat”. Kemudian visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

- “1. Bangkit merupakan sebuah aksi yang dimulai dari keyakinan diri untuk menggugah seluruh kemampuan agar aktif dalam melakukan gerakan pembangunan.
2. Bersama, dimana pemerintah memiliki kewajiban dalam mewujudkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat Sragen pada setiap bidang pembangunan terutama yang menyangkut kepentingan masyarakat dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.
3. Sejahtera berbasis pada ketahanan keluarga dan lingkungan sebagai dasar penguatan sosial melalui peningkatan partisipasi dan kerjasama seluruh lapisan masyarakat serta sejahtera secara batiniyah, yang meliputi: agama, kesehatan, pendidikan, dan keamanan.
4. Bermartabat dimaksudkan pembangunan yang diselenggarakan secara bersama-sama, harus mampu membentuk karakter masyarakat yang memiliki harkat dan kepercayaan diri yang tinggi untuk

mencapai kualitas hidup yang lebih baik, sehingga bisa menjadikan Sragen sebagai contoh kemajuan bagi daerah lainnya (www.sragen.go.id).”

Adapun beberapa misi yang dimiliki Kabupaten Sragen adalah sebagai berikut:

- “1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, aspiratif, partisipatif dan transparan.
2. Pembangunan infrastruktur yang menyeluruh dan berkualitas untuk mempercepat capaian aspek-aspek pembangunan.
3. Membangun kemandirian ekonomi daerah melalui optimalisasi potensi pertanian dan industri, serta memberikan akses yang lebih besar pada pengembangan koperasi, industri kecil dan menengah, dan sektor informal.
4. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas untuk meningkatkan daya saing daerah.
5. Meningkatkan Pemberdayaan dan Peran Perempuan dalam berbagai aspek (www.sragen.go.id).”

Secara administrasi Kabupaten Sragen terbagi menjadi 20 Kecamatan, dengan jumlah Desa dan Kelurahan sebanyak 208 (www.sragen.go.id). Jumlah Penduduk Kabupaten Sragen sebanyak 887.715 jiwa, dengan kepadatan wilayah 943 per km (www.sragen.go.id).

2.1.1 Kondisi Sosial dan Politik Kabupaten Sragen

Lingkungan sosial kemasyarakatan Kabupaten Sragen terdiri dari penduduk yang heterogen, mulai dari etnis *Thionghoa*, pendatang dan penduduk asli Kabupaten Sragen. Hal tersebut juga berdampak pada

agama yang dianut oleh masyarakat, sehingga di Kabupaten Sragen terdapat agama Islam dengan jumlah pemeluk 870.465 jiwa, Kristen sebanyak 5.467 pemeluk, Katolik 10.490 orang, Hindu sebanyak 1.022 jiwa, dan Budha merupakan agama yang paling sedikit pemeluknya yaitu sebanyak 235 pemeluk (www.sragenkab.go.id, 2016).

Politik akan dapat menentukan bagaimana Kabupaten Sragen akan membawa kemajuan di segala aspek kehidupan masyarakatnya. Berdasarkan letak geografis per Kecamatan di Kabupaten Sragen, maka wilayah Dapil (Daerah Pemilihan) dibagi menjadi 6 antara lain:

1. Dapil 1 meliputi: Kecamatan Sragen, Kecamatan Sidoharjo, serta Kecamatan Masaran.
2. Dapil 2 antara lain: Kecamatan Kedawaung, Kecamatan Ngrampal, dan Kecamatan Karangmalang.
3. Dapil 3 terdapat Kecamatan Plupuh, Kecamatan Gemolong, serta Kecamatan Kalijambe.
4. Pada Dapil 4 meliputi: Kecamatan Miri, Kecamatan Tanon, dan Kecamatan Sumberlawang.
5. Dapil 5 memiliki wilayah kecamatan terbanyak, yaitu: Kecamatan Mondokan, Kecamatan Gesi, Kecamatan Sukodono, Kecamatan Tangen, serta Kecamatan Jenar.
6. Dapil 6 terdapat Kecamatan Gondang, Kecamatan Sambirejo, dan Kecamatan Sambungmacan (<https://sragenkab.bps.go.id>).

2.2 Partai Golkar

2.2.1 Sejarah Partai Golkar

Melalui Maklumat Wakil Presiden Nomor X pada bulan Oktober 1945 yang didalamnya berisi memberikan kesempatan mendirikan partai-partai politik dengan ideologi yang beranekaragam (Sumarwati, 2011). Hal ini menimbulkan kehidupan perpolitikan menjadi sistem multi partai, dan persaingan politik berada di tangan partai politik. Kemudian setelah terjadi kekacauan pada tahun 1957, dalam upaya menjaga keamanan TNI sadar bahwa tidak semua persoalan diselesaikan melalui senjata. Hal ini disebabkan persoalan yang terjadi kala itu dilatar belakangi dengan sosial politik, selanjutnya langkah yang diambil untuk mengatasi permasalahan ini adalah golongan-golongan fungsional dikumpulkan untuk berpartisipasi dalam pemulihan keamanan.

Golongan-golongan fungsionalis tersebut menurut Anderas Pandiangan (19961) dalam (Sumarwati, 2011) terdiri dari Badan Kerjasama Tani Militer, Pemuda Militer, Buruh Militer, Wanita Militer, dan Ulama Militer. Anderas Pandiangan (19961) dalam (Sumarwati, 2011) juga mengungkapkan setelah mendapatkan respon positif badan-badan tersebut menyatakan sebagai organisasi fungsional yang independen. Tahun 1960-1964 adalah waktu yang tepat untuk parta-partai memperkuat diri kembali, tersemasuk juga dengan organisasi karya non afiliasi (Sumarwati, 2011). Akan tetapi pada tahun 1964 sumarwati (2011) dalam

tulisannya menjelaskan “Soekarno pada tahun tersebut mengeluarkan Perpres yang mengatur syarat organisasi untuk menjadi front nasional, sedangkan syarat tersebut memberatkan organisasi-organisasi yang ada pada waktu itu”.

Menurut penjelasan dari Imam Pratigny (1984) dalam (Sumarwati, 2011) dengan keluarnya Perpres tersebut, mendorong Golongan Kekayaan dan organisasi non afiliasi untuk menandatangani piagam pernyataan dasar karyawan. Melalui perjuangan yang cukup panjang sesuai dengan Perpres No 12 Tahun 1959 diangkatlah 200 orang wakil-wakil golongan kekayaan di MPRS (Sumarwati, 2011). Kemudian dengan Kepres No 193 Tahun 1964 diakuilah wakil-wakil golongan kekayaan di front nasional (Sumarwati, 2011). Seiring dengan pengakuan tersebut Leo Suryadinata (1992) dalam (Sumarwati, 2011) menerangkan bahwa “tanggal 20 Oktober 1964 dilakukan pertemuan pertama kalinya dengan organisasi golongan karya non afiliasi, dan pada tanggal tersebut Sekber Golkar resmi berdiri”.

Perkembangan Sekber Golkar melesat hingga masa Orde Baru pada saat itu Soeharto mengeluarkan peraturan yang berisi kewajiban PNS untuk menyalurkan aspirasi politiknya melalui Sekber Golkar. Hal ini didukung dengan Undang-Undang No 6 Tahun 1970 (Sumarwati, 2011). Pada 1971 Golkar pertama kalinya ikut serta dalam Pemilu dan berhasil menang mutlak dengan perolehan suara 62,79% (Sumarwati, 2011).

Ditahun yang sama juga Sekber Golkar berubah nama menjadi Golkar, dua tahun berikutnya Golkar resmi dikukuhkan.

Sekber Golkar di Kabupaten Sragen berdiri bersama dengan Sekber Golkar di daerah-daerah lain di Indonesia (Sumarwati, 2011). Pada awal berdiri Sekber Golkar menampung organisasi-organisasi kekartisan dan organisasi rohaniawan yang tidak bergabung dengan partai politik (Sumarwati, 2011). Selain itu Sumarwati (2011) juga menjelaskan selain organisasi tersebut juga terdapat beberapa organisasi masyarakat, seperti: Ormas Buruh (Buruh Proklamasi, Gasbindo, Buruh Pancasila), Ormas Tani (Petani, Petanu, Petani Muhammadiyah, dan Petani Pancasila), serta Ormas Wanita (Muslimin, Wanita Katholik, dan Marhaen). Pada awal Pemilu tahun 1971 Golkar di Kabupaten Sragen kalah dengan PDI, akan tetapi pada Pemilu berikutnya selama Orde Baru Golkar menjadi pemenang (Sumarwati, 2011).

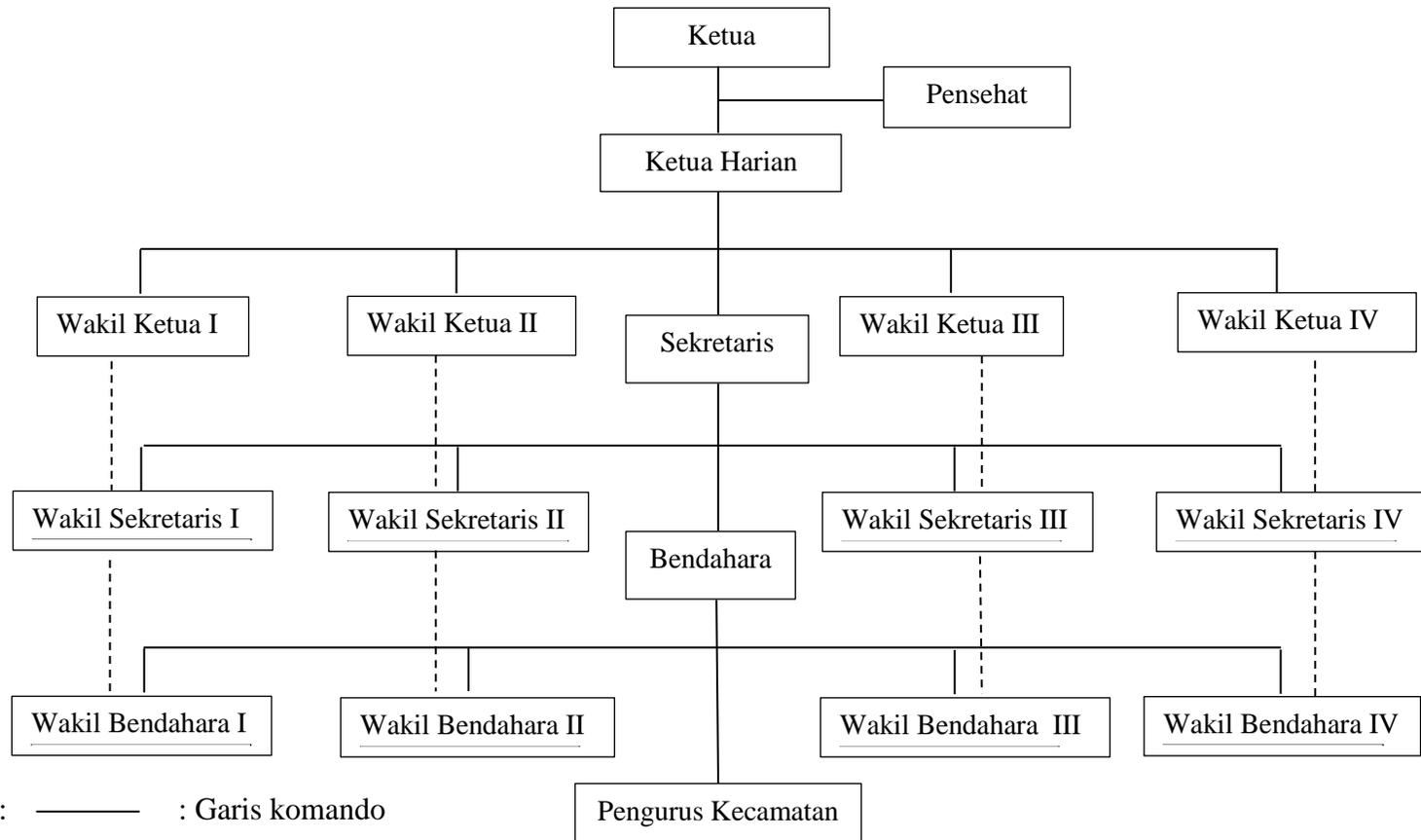
2.2.2 Struktur Organisasi Partai Golkar

Partai Golkar dalam struktur organisasinya terbagi menjadi beberapa level pengurus, level tersebut antara lain: Pengurus pusat, Pengurus Daerah Provinsi, Pengurus Daerah Kabupaten, Pengurus Kecamatan, dan Desa. Berdasarkan ART Partai Golkar tahun 2016 pasal 6 ayat 2 Pengurus pusat terdiri dari pengurus pleno dan pengurus harian (45 orang). Pengurus pleno disini adalah seluruh pengurus dewan pimpinan pusat., dengan jumlah 117 orang. Pada pengurus Daerah Provinsi jumlah pengurus pleno

sebanyak 85 orang, pengurus harian sebanyak 35 orang (ART Partai Golkar 2016).

Kemudian Pengurus daerah Kabupaten pengurus pleno sebanyak 65 orang, tetapi di Kabuten Sragen sebanyak 50 rang (Sekretaris DPD Golkar), sedangkan pengurus harian sebanyak 25 orang. Selanjunya pengurus Kecamatan jumlah pengurus pleno sebanyak 45 orang, dan pengurus harian sebanyak 15 orang. Terakhir pada pengurus Desa/Kelurahan pengurus pleno sebanyak 25 orang, serta pengurus harian sebanyak 11 orang. Disamping itu Partai Golkar juga memiliki organisasi sayap seperti: Persatuan Pemuda Golkar dan Persatuan Wanita Golkar.

Susunan struktur organisasi Partai Golkar terdiri dari: Ketua DPD dijabat oleh Agus Fatchur Rahman selama 3 periode (sejak 2004 hingga 2021), jabatan Ketua Harian dipegang oleh Bambang Widjo Purwanto (Wakil Ketua DPRD Sragen), Sekretaris dijabat oleh Sri Pambudi, Bendahara DPD dipegang oleh Pujono Eli Bayu Efendi (Anggota DPRD Sragen), serta terdiri dari beberapa bagian dan Pengurus Kecamatan. Kemudian pada Ketua Harian hingga Bendahara memiliki empat orang wakil. Pada susunan organisasi juga memiliki dewan penasehat yang terdiri dari 13 anggota. Berikut merupakan struktur bagan Pengurus Daerah Partai Golkar Periode 2016-2021:



Keterangan: — : Garis komando
 - - - - - : Garis koordinasi

Gambar 1.4. Struktur Organisasi Pengurus Daerah Partai Golkar Periode 2016-2021.
 Sumber: DPD Golkar Kabupaten Sragen, 2017.

2.2.3 Tujuan, Tugas, dan Fungsi Partai Golkar

Tujuan terbentuknya Partai Golkar diatur dalam pasal 7 pada Anggaran Dasar Partai Golkar tahun 2016. Tujuan tersebut antara lain:

1. Mempertahankan dan mengamalkan Pancasila dan menegakkan UUD 1945.
2. Mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
3. Menciptakan masyarakat adil makmur, merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah NKRI.
4. Mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi, yang menjunjung tinggi dan menghormati kebenaran, keadilan, hukum, dan HAM.

Guna mencapai tujuan tersebut, maka didalam Anggaran Dasar Partai Golkar tahun 2016, juga dijelaskan mengenai tugas pokok dari Partai Golkar tepatnya dalam pasal 8. Tugas pokok yang dimaksud adalah “mewujudkan peningkatan segala aspek kehidupan meliputi: ideologi, politik, ekonomi, agama, sosial, budaya, hokum, serta pertahanan, keamanan nasional guna mewujudkan cita-cita nasional”. Adapun fungsi pokok dari Partai Golkar diatur dalam pasal 9 Anggaran Dasar Partai Golkar tahun 2016, yang meliputi:

- “1. Menghimpun persamaan sikap politik dan kehendak untuk mencapai cita-cita dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur, material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
2. Mempertahankan, mengemban, mengamalkan, dan membela Pancasila serta berorientasi pada

- program pembangunan disegala bidang tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan.
3. Menyerap, menampung, menyalurkan, dan memperjuangkan aspirasi rakyat, serta meningkatkan kesadaran politik rakyat dan meyiapkan kader-kader dengan memperhatikan kesetaraan gender dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”

2.2.4 Doktrin, Ikrar, dan Paradigma Partai Golkar

Doktrin yang sering diungkapkan oleh Partai Golkar diatur dalam Pasal 10 Anggaran Dasar Partai Golkar Tahun 2016. Doktrin tersebut dijelaskan dalam dalam 3 ayat, diantara: pada ayat 1 diatur mengenai doktrin Partai Golkar yang disebut dengan “Karya Siaga Gatra Praja”. Kemudian pada ayat 2 dijelaskan doktrin tersebut merupakan “kesatuan pemikiran dan pemahaman yang menyangkut pengembangan dan pelaksanaan karya serta kekaryaannya secara nyata dalam perjuangan Partai Golkar”. Terakhir ayat 3 mengungkapkan bahwa “doktrin tersebut berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan usaha segala bidang”.

Partai Golkar memiliki ikrar yang disebut dengan “Panca Bhakti” (pasal 11 ayat 1 Anggaran Dasar Partai Golkar tahun 2016). Pengertian Panca Bhakti dijelaskan pada pasal 11 ayat 2 yang berbunyi “Panca Bhakti merupakan penegasan kedaulatan tekad sebagai cara mewujudkan tujuan Partai Golkar”. Selain itu pada ayat 3 Panca Bhakti dimaksudkan sebagai pendorong semangat dalam melaksanakan perjuangan Partai

Golkar. Berikut merupakan bunyi dari Panca Bhakti sesuai dengan ayat 4 pasal 11 Anggaran Dasar tahun 2016:

- “1. Kami warga Partai Golongan Karya adalah insan yang percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Kami warga Partai Golongan Karya adalah pejuang dan pelaksana untuk mewujudkan cita-cita Proklamasi 1945, pembela serta pengamal Pancasila.
3. Kami warga Partai Golongan Karya adalah Pembina persatuan dan kesatuan bangsa yang berwatak setia kawan.
4. Kami warga Partai Golongan Karya bertekad bulat melaksanakan amanat penderitaan rakyat untuk membangun masyarakat adil, makmur, aman, tertib, dan sentosa.
5. Kami warga Partai Golongan Karya setia kepada Undang-Undang Dasar 1945, mengutamakan kerja keras, jujur, dan bertanggung jawab, dalam melaksanakan pembaharuan dan pembangunan.”

Selain doktrin dan ikrar yang dijelaskan dalam Anggaran Dasar Partai Golkar tahun 2016, juga dijelaskan mengenai paradigma Partai Golkar yang ditertuang dalam pasal 12 ayat 1 berbunyi “paradigma merupakan cara pandang Partai Golkar tentang diri dan lingkungannya melalui pembaharuan internal dan eksternal dalam rangka mewujudkan tujuan.”

2.2.5 Visi, Misi, dan Cita-Cita Partai Golkar di Kabupaten Sragen

Visi Golkar di Kabupaten Sragen yang dicanangkan saat ini adalah mewujudkan masyarakat Kabupaten Sragen adil, makmur dan sejahtera (Sekretaris DPD, 2017). Kemudian visi ini diwujudkan kedalam kegiatan-

kegiatan yang diselenggarakan oleh Golkar, seperti kegiatan sosial yang ditujukan kepada masyarakat yang membutuhkan. Sedangkan misi yang dicanangkan oleh Golkar adalah membawa Negara berideologi Pancasila sesuai dengan amanat Pembukaan UUD 1945 (Sekretaris DPD, 2017). Hal tersebut sesuai dengan asas Partai Golkar yang diatur dalam pasal 5 Anggaran Dasar Partai Golkar tahun 2016, yang berbunyi “Partai Golkar berasaskan Pancasila”.

Selain visi dan misi Partai Golkar di Kabupaten Sragen memiliki cita-cita dapat menempatkan kader-kader di lembaga eksekutif dan legislatif (Sekretaris DPD, 2017). Penempatan tersebut bertujuan agar Partai Golkar dapat membawa Sragen kepada keadaan yang lebih baik (Sekretaris DPD, 2017). Selain itu berdasarkan berita yang disampaikan oleh Wardoyo (2016) dalam koran Joglosemar, Partai Golkar pada tahun 2019 berkeinginan untuk mengusung ketua DPD Golkar pada Pileg DPR RI, sedangkan untuk legislatif di daerah Kabupaten Partai Golkar berharap minimal dapat mempertahankan perolehan kursi DPRD Kabupaten Sragen.